HADIR DALAM KULIAH UMUM, OMBUDSMAN BABEL AJAK MAHASISWA EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

Rabu, 16 November 2022 - Agung Nugraha

Pangkalpinang - Plh. Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Mariani hadir sebagai dosen tamu dalam perkuliahan Politik Anti Korupsi di Gedung I Fakulitas Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Rabu (16/11/2022).

Kegiatan ini diikuti para mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah Politik Anti Korupsi, Novendra Hidayat. "Saya berterima kasih karena Ombudsman Babel mau terlibat dalam kuliah umum ini sebagai dosen tamu. Hal ini diharapkan dapat menambah cakrawala para mahasiswa dalam memami tugas dan fungsi Ombudsman dalam mencegah korupsi bagi para mahasiswa FISIP UBB. Semoga kerja sama ini bisa berkelanjutan," ucap Novendra.

Dalam penyampain materi kuliah Politik Anti Korupsi ini juga membahas tentang peran Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, hubungan politik anti korupsi dengan Ombudsman RI, serta pemahaman tentang maladministrasi.

Dalam sesi diskusi, hampir semua peserta mahasiswa mengaku pernah mengalami maladministrasi dalam pelayanan publik, terutama dimintakan uang agar permohonan atau kepentingannya cepat diselesaikan. Menanggapi hal tersebut, Ombudsman Babel menghimbau agar mahasiswa memiliki peran untuk memberikan evaluasi bahwa jika tidak diperkenankan penarikan bayaran jika jelas layanan tersebut gratis. Sedangkan jika ada retribusi atau PNBP yang mendasari maka sudah menjadi kewajiban untuk membayar. Hal tersebut agar kita tidak turut menyuburkan potensi korupsi di instansi penyelenggara.

Dalam kesempatan ini, Mariani juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan dalam upaya Ombudsman Babel menyosialisasikan peran dan tugas Ombudsman TI. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk ditanamkan kepada mahasiswa sebagai katalisator pembangunan negara. "Permasalahan korupsi yang muncul bermula dari adanya kesempatan melakukan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, maka dari itu peran Ombudsman secara kelembagaan merupakan aspek politik dari negara untuk menjamin kepastian layanan kepada warga negaranya," tutur Mariani.